

Tantangan Independensi Media di Tahun Politik



Tiga dosen Universitas Malikussaleh menjadi pemateri dalam diskusi publik memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia di Lapangan Hiraq, Lhokseumawe, Rabu (10/5/2023). Foto: Ist.

PEMILIHAN Umum 2024 mendatang menjadi pertarungan bagi independensi media di tengah kepemilikan media massa yang bersentuhan kepentingan politik. Tanggung jawab media massa untuk menjaga nilai-nilai jurnalisme yang netral, independen, serta akurat tetap harus dijaga di tengah adanya kepentingan ekonomis perusahaan media sebagai organisasi bisnis.

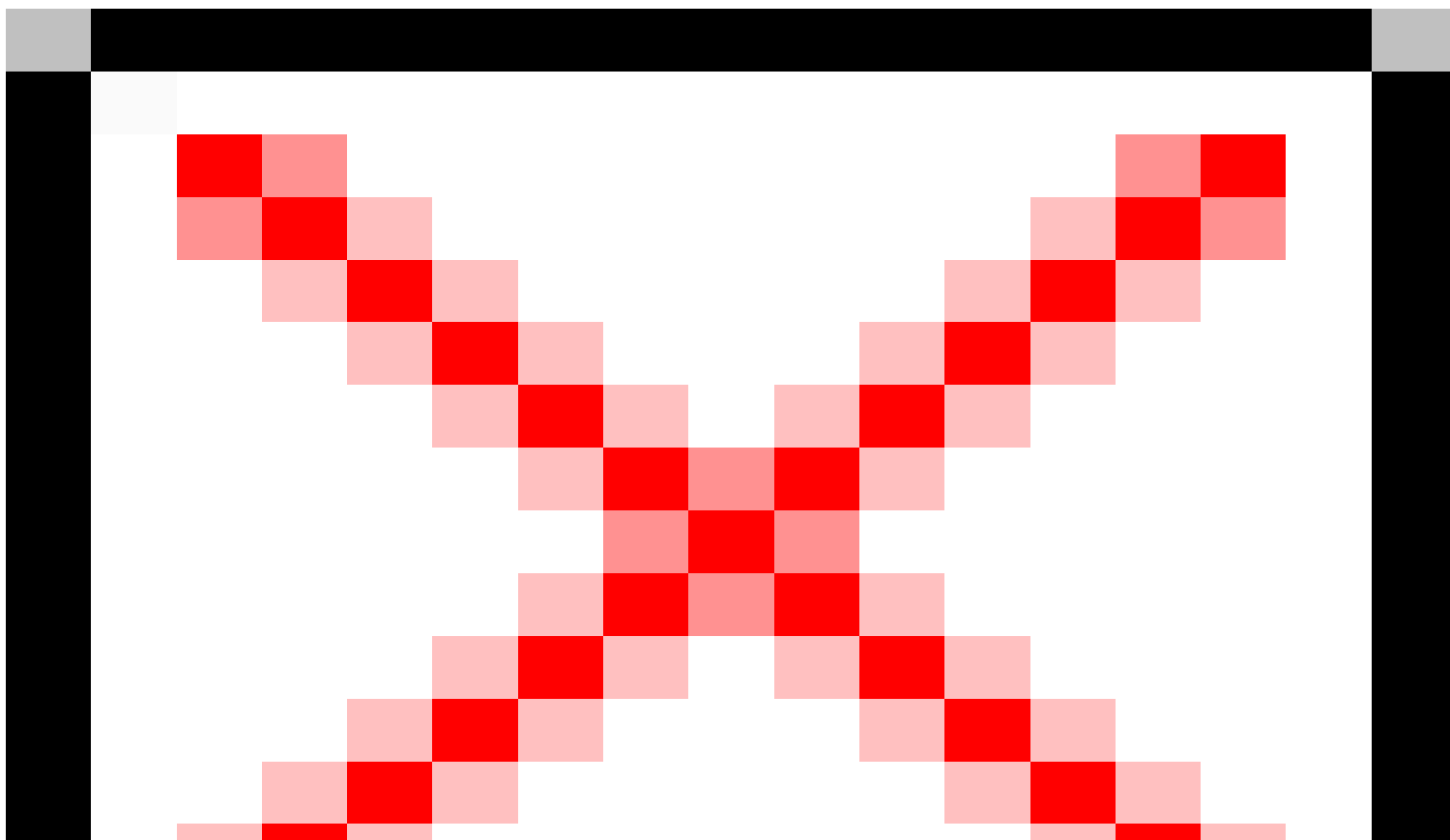
Media massa di Indonesia menghadapi godaan besar dalam menjaga independensi dan netralitas sebagai bagian dari profesionalisme. Benturan kepentingan kekuasaan dan ekonomis membuat independensi menjadi sebuah cita-cita yang masih membutuhkan waktu panjang untuk mewujudkannya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Dr Tgk M Rizwan Haji Ali mengatakan isu independensi media itu muncul menjelang pemilu, karena ada tiga sebab. Pertama, ada kecenderungan media massa mempresentasikan berita-berita dari sebuah pikiran politik yang didukung oleh pemilik media ataupun wartawan yang ada di media itu.

“Ketika pemilik media atau wartawan memiliki afiliasi politik, maka presentasi pemberitaan akan menggambarkan dan merepresentasikan kondisi politik yang didukung pikiran-pikiran politik itu. Karena itu, banyak orang berteriak, orang-orang yang mungkin berada di luar kepemilikan media itu menuntut objektivitas, netralitas, dan independensi pers. Media dapat dijadikan sebagai senjata politik,” ujar Tgk Rizwan dalam diskusi publik memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lhokseumawe di Lapangan Hiraq, Lhokseumawe, Rabu (10/5/2023).

Kedua, lanjut Tgk. Rizwan, media punya kemampuan membentuk agenda publik, sehingga apa yang dipresentasi oleh media yang pada awalnya merupakan pikiran segmented dari satu pikiran politik, dari satu garis politik, dari satu bagian perjuangan politik kelompok, ketika disampaikan secara terus-menerus maka dia menjadi agenda publik.

“Ketika publik sudah menjadikan sebagai agenda, maka diharapkan akan terjadi penerjemahan dari agenda kepada dukungan elektoral dalam bentuk voting saat pemilu,” jelas Tgk. Rizwan yang juga menjabat ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Lhokseumawe.



Tanggal: 12 May 2023

Post by: [Bastin](#)

Kategori: [News](#), [Feature](#),

Tags: [Unimal](#), [Aceh](#), [Lhokseumawe](#), [Unimal Hebat](#), [Media Massa](#),